

**TAHUN
2019**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY

Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta
Telp. (0274) 589583
Website : <http://bappeda.jogjaprovo.go.id>

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda DIY Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjIP Bappeda DIY Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2020
Kepala Bappeda DIY

Budi Wibowo, SH, MM
NIP. 19610127 198503 1 006

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Bappeda DIY tahun 2019 dalam mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas” dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pencapaian sasaran diukur dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah (indikator sasaran perangkat daerah tahun N yang tercapai/indikator sasaran RPJMD x 100%)
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 8 (delapan) program, yaitu (1)Program Perencanaan Pembangunan Daerah, (2)Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, (3)Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, (4)Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana, (5)Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, (6)Program Pengendalian Pembangunan Daerah, (7)Program Pengembangan Statistik Daerah, dan (8)Program Penelitian dan Pengembangan
- Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 84%, dengan realisasi tahun 2019 sebesar 95,95%, sehingga capaian target pada tahun 2019 sebesar 114,2%
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2018 sebesar 91,35% terjadi peningkatan sebesar 5,03%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda DIY ke depan, sebagai berikut :

1. Dinamika kebijakan pemerintah pusat yang cepat dan harus direspon ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan di daerah;
2. Pembangunan basis data terpadu untuk kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya data spasial yang masih perlu dioptimalkan
3. Peningkatan kualitas hasil penelitian untuk mendukung kebijakan perencanaan pembangunan

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	7
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Organisasi Setda DIY	9
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	10
1.4 Isu-isu Strategis	12
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	12
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2019	20
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	22
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019	28
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019	31
3.3. Realisasi Anggaran	32
3.4 Inovasi	33
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	35

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	15
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019.....	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis Bappeda DIY, 2017-2022	18
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	18
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019	20
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019	22
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2019.....	23
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019	28
Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	29
Tabel III.4 Data Dukung Capaian Sasaran Bappeda	29

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	8
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Bappeda DIY	9
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Bappeda DIY	10
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	23
Gambar II.2. Sistem Aplikasi Perencanaan Jogjaplan	24
Gambar II.3. Aplikasi Dataku	25
Gambar II.4. Sistem Informasi Internal Bappeda DIY	26

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun sebelumnya*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

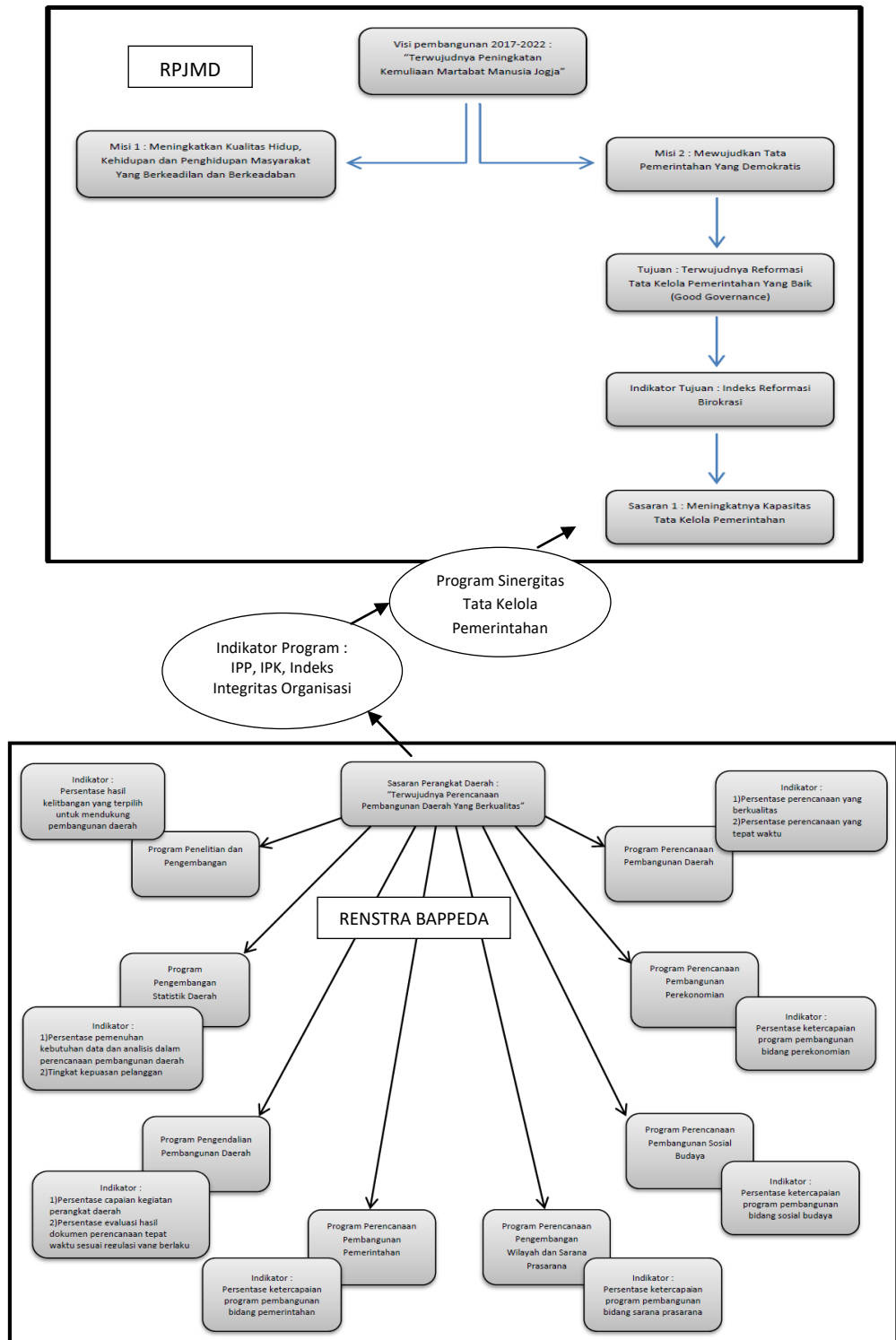
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

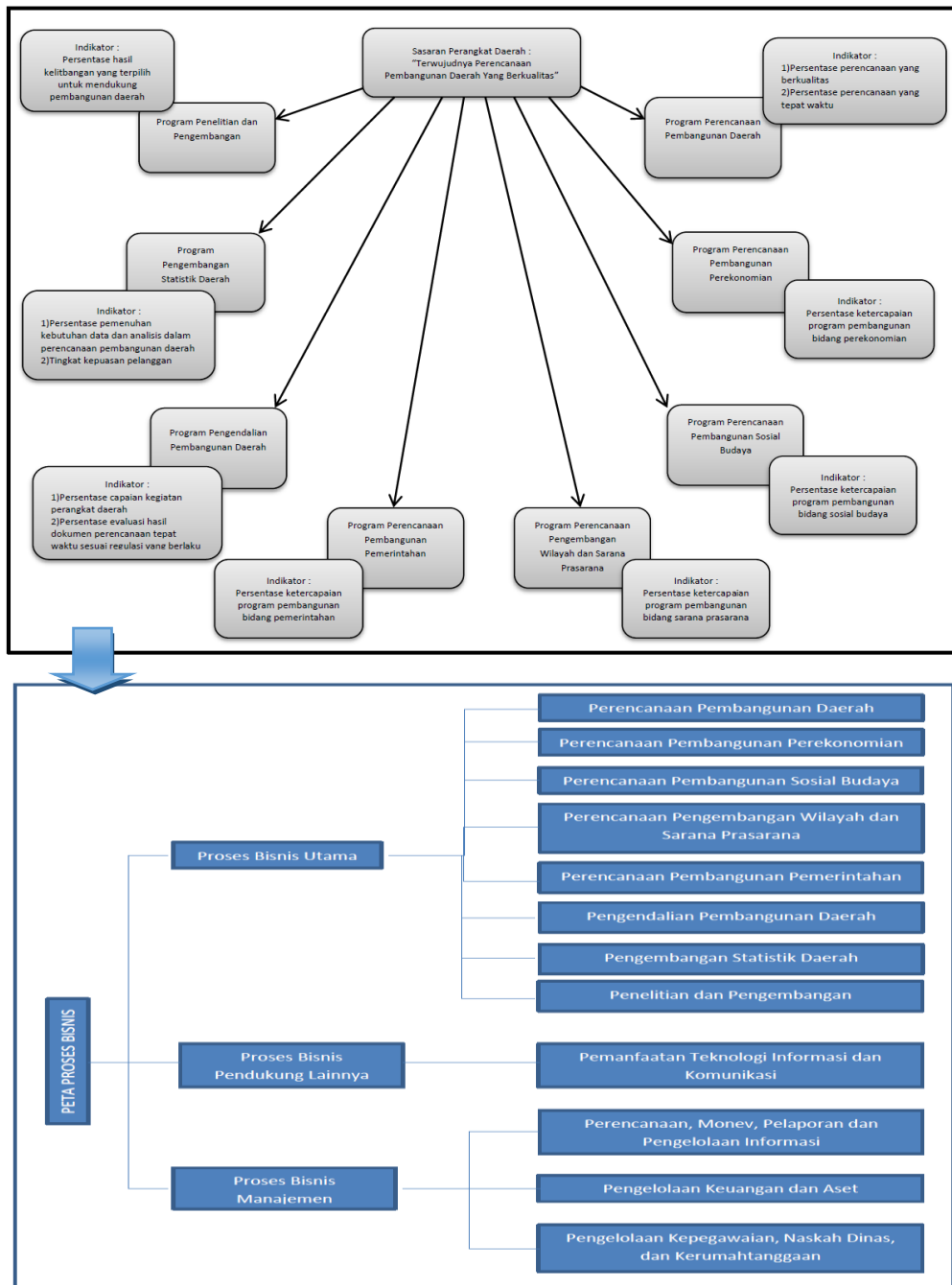
Gambar I.1 Cascading Kinerja

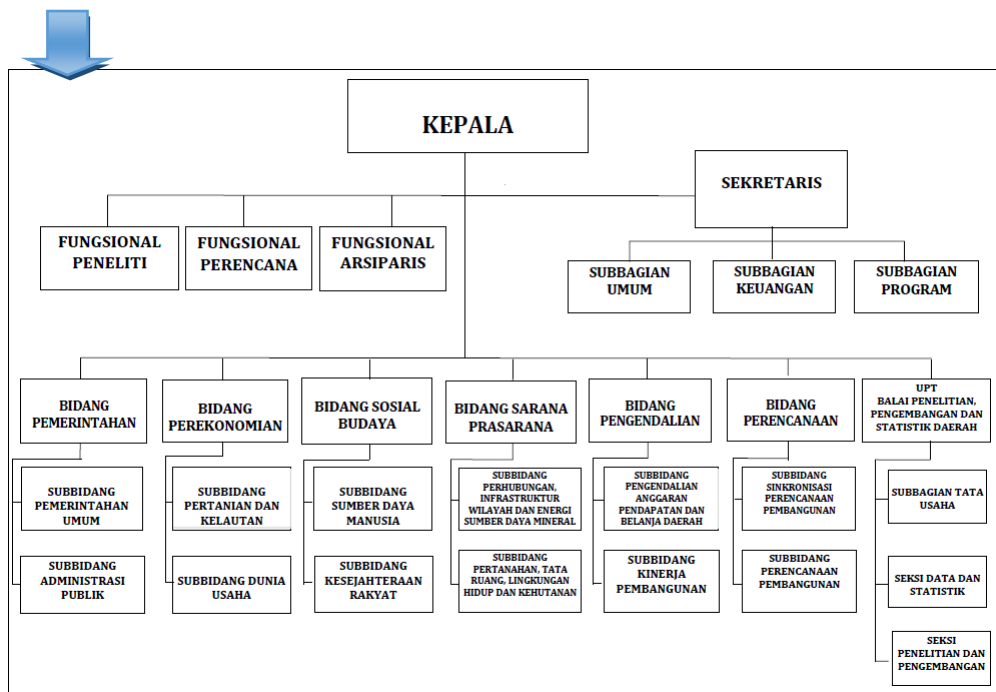


1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Organisasi Setda DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Bappeda DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Organisasi Setda DIY





1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Bappeda DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Bappeda DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 75 dan 99 Tahun 2019 tentang Bappeda dan UPT Bappeda, Bappeda dan UPT Bappeda memiliki tugas melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penelitian dan pengembangan. Fungsi Bappeda dan UPT Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja Bappeda
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan statistik
5. Penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di DIY
6. Penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
7. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota
8. Penyusunan rencana kerja Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah
9. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data pembangunan daerah
10. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data pembangunan daerah
11. Pelayanan data dan informasi statistik daerah
12. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
13. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan



Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Bappeda dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional dengan komposisi sebagai berikut :

Jabatan Struktural dan Fungsional	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Kepala Badan Sekretaris <ol style="list-style-type: none"> Ka Subbag Umum Ka Subbag Keuangan Ka Subbag Program Kepala Bidang Pemerintahan <ol style="list-style-type: none"> Ka Subbid Pemerintahan Umum Ka Subbid Administrasi Publik Kepala Bidang Sosial Budaya <ol style="list-style-type: none"> Ka Subbid Sumber Daya Manusia Ka Subbid Kesejahteraan Rakyat Kepala Bidang Perekonomian <ol style="list-style-type: none"> Ka Subbid Pertanian dan Kelautan Ka Subbid Dunia Usaha Kepala Bidang Sarana Prasarana <ol style="list-style-type: none"> Ka Subbid Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan Energi Sumber Daya Mineral Ka Subbid Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepala Bidang Pengendalian <ol style="list-style-type: none"> Ka Subbid Pengendalian APBD Ka Subbid Kinerja Pembangunan Kepala Bidang Perencanaan <ol style="list-style-type: none"> Ka Subbid Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ka Subbid Perencanaan Pembangunan Kepala Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah <ol style="list-style-type: none"> Ka Subbag Tata Usaha Ka Sie Data dan Statistik Ka Sie Penelitian dan Pengembangan Fungsional Tertentu <ol style="list-style-type: none"> Fungsional Perencana Fungsional Peneliti Fungsional Arsiparis 	<ol style="list-style-type: none"> Di bawah Ka Subbag Umum : <ol style="list-style-type: none"> 1)Pengadministrasi Umum, 2)Pengadministrasi Persuratan, 3)Pranata Kearsipan, 4)Pengadministrasi Kepegawaian, 5)Teknisi Sarana dan Prasarana, 6)Pengelola Barang Milik Negara, 7)Pengemudi Di bawah Ka Subbag Keuangan : <ol style="list-style-type: none"> 1)Bendahara, 2)Pengadministrasi Keuangan, 3)Pengelola Gaji, 4)Pengelola Akuntansi, 5)Verifikator Data Laporan Keuangan Di bawah Ka Subbag Program : <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Pengelola Sistem dan Jaringan Di bawah Ka Subbid Pemerintahan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan Di bawah Ka Subbid Administrasi Publik <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Perencanaan Di bawah Ka Subbid Sumber Daya Manusia <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan Di bawah Ka Subbid Kesejahteraan Rakyat <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Perencanaan Di bawah Ka Subbid Pertanian dan Kelautan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan Di bawah Ka Subbid Dunia Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Perencanaan Di bawah Ka Subbid Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan Energi Sumber Daya Mineral <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan Di bawah Ka Subbid Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Perencanaan Di bawah Ka Subbid Pengendalian APBD <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Di bawah Ka Subbid Kinerja Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengevaluasi Program dan Kinerja Di bawah Ka Subbid Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Program Pembangunan Di bawah Ka Subbid Perencanaan Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Perencanaan Di bawah Ka Subbag Tata Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1)Pengadministrasi Persuratan, 2)Pranata Kearsipan, 3)Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, 4)Pengadministrasi Kepegawaian, 5)Pengelola Barang Milik Negara, 6)Bendahara, 7)Pengadministrasi Keuangan, 8)Pengelola Gaji, 9)Pengelola Akuntansi, 10)Verifikator Data Laporan Keuangan, 11)Teknisi Sarana dan Prasarana Di bawah Ka Sie Data dan Statistik <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Statistik Di bawah Ka Sie Penelitian dan Pengembangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang

1.4 Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bappeda sebagai perangkat daerah perlu untuk mengidentifikasi dan memahami isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tiga urusan, yaitu perencanaan pembangunan, statistik, serta penelitian dan pengembangan. Pemahaman terhadap isu strategis diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis tersebut meliputi :

1. Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dengan kabupaten/kota dan pemerintah pusat
Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan tetap menjadi isu yang penting dengan adanya dinamika kebijakan dari pemerintah pusat yang cukup cepat dan perlu diimplementasikan di level provinsi. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga diperlukan untuk menentukan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, efektif dan efisien.
2. Penyediaan data yang akurat dan akuntabel untuk perencanaan pembangunan
Perencanaan pembangunan yang berkualitas membutuhkan input berupa data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan di dalam penyediaan data umumnya adalah data yang tidak ter update, serta adanya versi data yang berbeda-beda. Selain itu, kebanyakan data pembangunan disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga seringkali perencanaan harus menyesuaikan tata kala publikasi data statistik dari BPS. Meskipun demikian, Bappeda melalui BPPSD telah berupaya menyajikan data sektoral pembangunan yang dapat diakses secara luas dari aplikasi Jogja Dataku
3. Pelaksanaan penelitian yang dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan
Selain data, perencanaan juga membutuhkan input berupa pengujian terhadap suatu permasalahan pembangunan yang dapat menghasilkan sebuah kesimpulan dalam bentuk penelitian. Rekomendasi hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan dan dapat mewujudkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*)

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jabatan Struktural						
1.	Kepala Badan	1	S1	1	S2	1	-
2.	Sekretaris Badan	1	S1	1	S2	-	1
3.	Kabid Perencanaan	1	S1	1	S2	1	-
4.	Kabid Perekonomian	1	S1	1	S1	-	1
5.	Kabid Sosial Budaya	1	S1	1	S2	-	1
6.	Kabid Sarana dan Prasarana	1	S1	1	S2	1	-
7.	Kabid Pemerintahan	1	S1	1	S2	-	1
8.	Kabid Pengendalian	1	S1	1	S2	1	-
9.	Kepala Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik	1	S1	1	S2	1	-
10.	Kasubbag Umum	1	S1	1	S2	-	1
11.	Kasubbag Keuangan	1	S1	1	S1	1	-
12.	Kasubbag Program	1	S1	1	S1	-	1
13.	Kasubbid Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1	S1	1	S2	1	-
14.	Kasubbid Perencanaan Pembangunan	1	S1	1	S2	1	-
15.	Kasubbid Pertanian dan Kelautan	1	S1	1	S2	1	-
16.	Kasubbid Dunia Usaha	1	S1	0	-	-	-
17.	Kasubbid Sumber Daya Manusia	1	S1	1	S2	-	1
18.	Kasubbid Kesejahteraan Rakyat	1	S1	1	S1	1	
19.	Kasubbid Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral	1	S1	1	S2	-	1
20.	Kasubbid Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	1	S1	1	S1	-	1
21.	Kasubbid Pemerintahan Umum	1	S1	1	S2	-	1
22.	Kasubbid Administrasi Publik	1	S1	1	S2	-	1
23.	Kasubbid Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1	S1	1	S2	1	-
24.	Kasubbid Kinerja Pembangunan	1	S1	1	S1	1	-
25.	Kasi Penelitian dan Pengembangan	1	S1	1	S2	1	-
26.	Kasi Data dan Statistik	1	S1	1	S2	-	1
27.	Kasubbag Tata Usaha	1	S1	1	S2	-	1
B.	Fungsional Tertentu						
1.	Fungsional Perencana	28	S1	16	S2, S1	9	7
2.	Fungsional Peneliti	5	S1	5	S2, S1	1	4
3.	Fungsional Arsiparis	1	SMA	1	SMA	-	1
4.	Penata Laksana Barang	1	SMA	0	-	-	-

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	Jabatan Pelaksana Substantif						
1.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	3	S1	1	S2		1
2.	Pengelola Sistem dan Jaringan	2	S1,D4	0	-	-	-
3.	Analisis Program Pembangunan	3	S1,D4	1	D3	1	
4.	Analisis Perencanaan	25	S1,D4	16	S1,S2	6	10
5.	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	3	S1,D4	0	-	-	-
6.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	3	S1,D4	0	-	-	-
7.	Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang			3	S1,S2	2	1
8.	Analisis Statistik	-		2	S2	2	-
9.	Calon Perencana	-		4	S1,S2	3	1
10.	CPNS	-		11	D3,S1	5	6
C.	Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif						
1.	Bendahara	1	S1	1	SMA	-	1
2.	Pengadministrasi Keuangan	4	D3	3	SMA	1	2
3.	Pengelola Gaji	1	D3	1	SMA	-	1
4.	Pengelola Akuntansi	1	D3	1	S1	-	1
5.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	1	S1	-	1
6.	Pengadministrasi Umum	1	D3	6	SMA	4	2
7.	Pengadministrasi Persuratan	2	D3	2	SMA	2	-
8.	Pranata Kearsipan	2	D3	1	SMA	-	1
9.	Pengadministrasi Kepegawaian	2	D3	2	SMA, D3	2	-
10.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	1	SMA	1	-
11.	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	2	SMA	2	-
12.	Pengemudi	1	SMK/SMA	1	SMA	1	-
	Jumlah	120		109		55	54

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda 2019

Berdasarkan data pada tabel I.1, dari data formasi jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 120 orang, formasi pegawai yang terisi sejumlah 109 orang, atau 90,8%, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sejumlah 11 orang, atau 9,2%. Perbandingan jenis kelamin pegawai laki-laki dan perempuan hampir seimbang yaitu sejumlah 55 pegawai laki-laki dan 54 pegawai perempuan, atau 50,46% pegawai laki-laki dan 49,54% pegawai perempuan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Alat-alat besar	2 unit	443.829.300
2	Alat-alat Angkutan	20 unit	2.424.107.342
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.477 unit	6.412.613.316
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	224 unit	2.072.989.000
5	Bangunan Gedung	4 unit	4.956.145.200
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	3.200 buku	78.827.840
	Aset Tidak Berwujud		
1	Aset Tidak Berwujud	100 unit	9.279.671.425
	Jumlah		25.708.050.922

Sumber : Data Sarana Prasarana Bappeda 2019

Secara umum, kebutuhan sarana dan prasarana di Bappeda telah tercukupi dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2018	6.846.905.797,00	18.986.501.619,50	25.833.407.416,50
2019	6.801.021.651,00	15.123.330.970,00	21.924.352.621,00

Sumber : Bappeda, 2019

Anggaran belanja total pada tahun 2018 sebesar Rp.25.833.407.416,50, dan pada tahun 2019 sebesar Rp.21.924.352.621,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp.3.909.054.795,50, atau 15,13%. Pada belanja langsung terdapat penurunan yang cukup besar dikarenakan pada tahun 2019 Bappeda tidak lagi mendapatkan dukungan penganggaran dari dana keistimewaan DIY. Belanja langsung tahun 2018 sebesar Rp.18.986.501.619,50 turun menjadi Rp.15.123.330.970,00 pada tahun 2019. Terdapat penurunan sebesar Rp.3.863.170.649,50, atau 20,35%.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01333 tanggal 6 Mei 2019, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja yang telah baik 2. Melakukan <i>management resource meeting</i> membahas ketersediaan input dengan target kinerja yang akan dicapai dan supervisi atas pengumpulan data kinerja sebagai tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Daerah DIY yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berupaya mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja menjadi lebih baik 2. Melakukan rapat koordinasi yang intensif antar bidang pengampu kinerja di Bappeda

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan 2019
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2019 merupakan tahun pertama penerapan Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*). Melalui Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY didesain paralel (*inline*) dengan alur (*cascading*) kinerja visi, misi, tujuan, sasaran, program Pemda, dan program OPD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2017 – 2022.

Perencanaan Pembangunan Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022 adalah :

“Menjadi institusi perencanaan yang bernilai tinggi”

Adapun sasaran Bappeda DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Bappeda DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	persen	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	<p>a. Mengoptimalkan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.</p> <p>b. Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan.</p> <p>c. Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk membangun sinergi melalui forum Pentahelix.</p> <p>d. Mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mewujudkan integrasi sistem perencanaan pembangunan</p> <p>e. Optimalisasi SDM untuk meningkatkan standar mutu perencanaan dan pengendalian Pembangunan</p> <p>f. Meningkatkan peran forum Pentahelix untuk membangun sinergi dengan kabuapten/kota</p>	<p>a. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sungguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappeda.</p> <p>b. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan.</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna</p>

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>g. Meningkatkan Teknologi Informasi untuk mengatasi perubahan kebijakan yang sering terjadi</p> <p>h. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>i. Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan koordinasi</p> <p>j. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk memperkecil dampak perubahan kebijakan</p> <p>k. Integrasi sistem perencanaan pembangunan meningkatkan untuk kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi</p> <p>l. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota</p>	<p>meningkatkan kualitas perencanaan dan monev pembangunan.</p> <p>d. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.</p> <p>e. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan</p> <p>f. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator.</p> <p>g. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiayaan pembangunan.</p> <p>h. Membangun link antar sistem informasi yang ada di internal Bappeda DIY dan dengan sistem informasi di luar Bappeda DIY yang terkait.</p> <p>i. Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan</p> <p>j. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur</p> <p>k. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu</p>

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data</p> <p>l. Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, SINTAL, JOGJA DATAKU, dll) sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>m. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur.</p>

Sumber : Renstra Bappeda 2017-2022

2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2019

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Bappeda DIY tahun 2019 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	1.1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.309.219.200,00
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2.036.792.200,00
	1.1.2. Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Kewilayahan	272.427.000,00
	1.2. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	1.118.661.000,00
	1.2.1. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	766.974.000,00
	1.2.2. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	311.255.000,00
	1.2.3. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	40.432.000,00

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	1.3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1.457.159.000,00
	1.3.1. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	190.000.000,00
	1.3.2. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	561.509.000,00
	1.3.3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	705.650.000,00
	1.4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	856.030.000,00
	1.4.1. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK)	146.030.000,00
	1.4.2. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	250.000.000,00
	1.4.3. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	460.000.000,00
	1.5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	686.925.060,00
	1.5.1. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	465.535.060,00
	1.5.2. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	221.390.000,00
	1.6. Program Pengendalian Pembangunan Daerah	1.928.582.500,00
	1.6.1. Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.467.292.500,00
	1.6.2. Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	461.290.000,00
	1.7. Program Pengembangan Statistik Daerah	2.217.234.500,00
	1.7.1. Penyediaan Data Statistik	1.488.888.000,00
	1.7.2. Penyajian dan Informasi Data Statistik	728.346.500,00
	1.8. Program Penelitian dan Pengembangan	500.000.000,00
	1.8.1. Penelitian Pembangunan Daerah	416.856.000,00
	1.8.2. Penyelenggaraan Jejaring Penelitian Pembangunan Daerah	83.144.000,00
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		11.073.811.260,00

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	1. Program Administrasi Perkantoran	2.297.997.010,00
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	815.545.320,00
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	195.205.690,00
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.287.246.000,00
2.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.106.689.000,00
	1.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	485.840.000,00
	1.2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	279.820.000,00
	1.3. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	130.764.000,00
	1.4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	210.265.000,00
3.	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	184.360.000,00
	1.1. Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	75.900.000,00
	1.2. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	108.460.000,00
4.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	460.473.700,00
	4.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	16.335.000,00
	4.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.313.000,00
	4.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	401.569.700,00
	4.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	12.256.000
	Total Anggaran Pendukung	4.049.519.710,00

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda DIY Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	84,5	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	84,5*

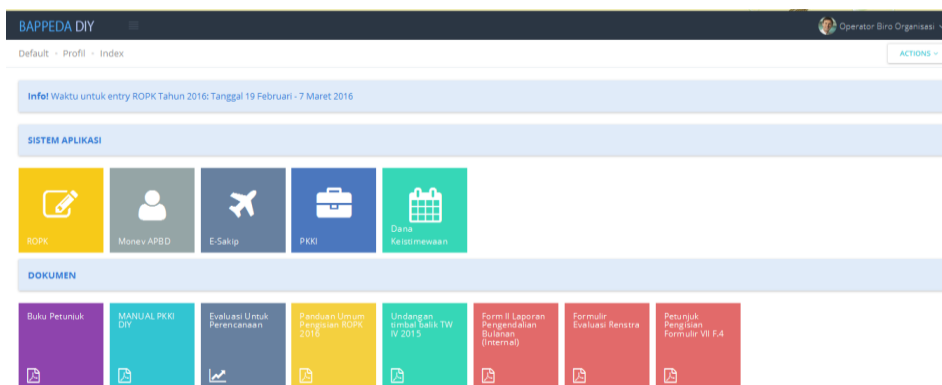
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Bappeda didukung beberapa instrumen, yaitu dengan pengembangan aplikasi :

2.5.1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

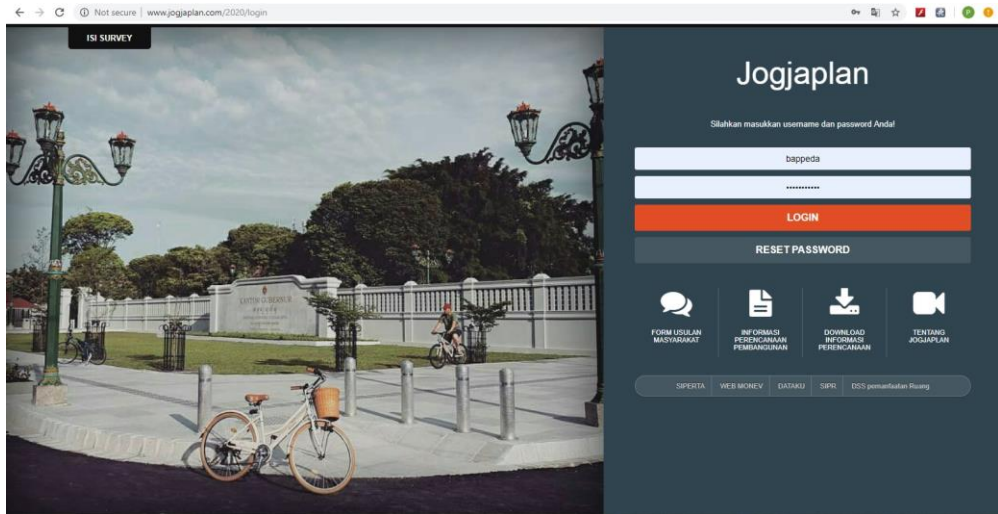


Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2.5.2. Aplikasi pendukung perencanaan Jogjaplan

Sistem Informasi Perencanaan (<http://jogjaplan.com>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS. Pengembangan yang terakhir adalah fitur Pokok Pikiran DPRD yang berfungsi untuk mengidentifikasi pokok-pokok pikiran legislatif dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Gambar aplikasi pendukung perencanaan Jogjaplan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II.2 Sistem Aplikasi Perencanaan Jogjaplan

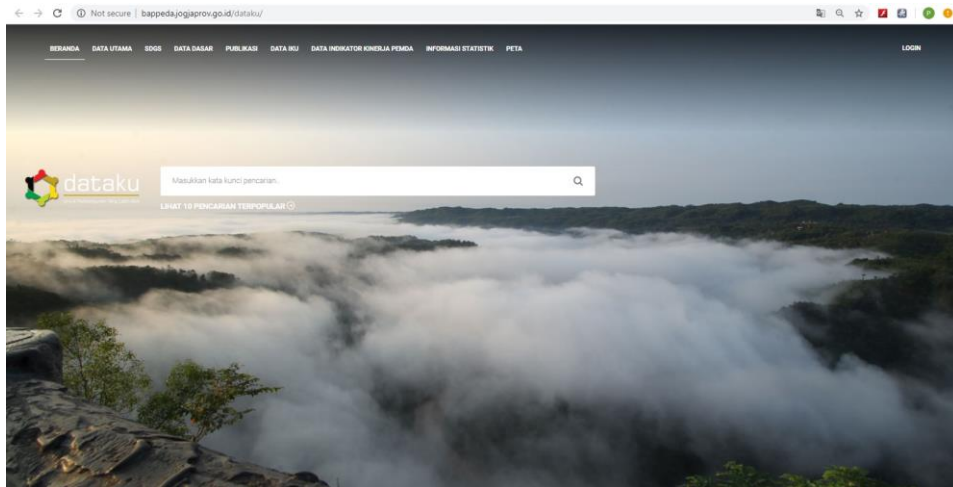


Sumber : <http://jogjaplan.com>

2.5.3. Aplikasi penyediaan data statistik Dataku

Sistem Aplikasi Dataku dengan alamat akses <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/> dikembangkan mulai tahun 2014 yang merupakan pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data perencanaan dengan tujuan untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan yang berasal dari semua stakeholder penyedia data baik provinsi maupun kabupaten/kota. Di dalam aplikasi Dataku, juga terdapat fitur data-data pendukung capaian indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) DIY, sehingga capaian indikator SDGs dapat dilihat dari tahun ke tahun. Gambar aplikasi Dataku dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II.3 Aplikasi Dataku



Sumber : <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>

2.5.4. Aplikasi Sistem Penanggulangan Kemiskinan

Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu adalah aplikasi sistem informasi manajemen data kemiskinan yang terintegrasi dan dikembangkan dengan teknologi berbasis web. Dengan Simnangkis, proses pengelolaan database kemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan menjadi efektif dan tepat sasaran. Aplikasi Sistem Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis) dapat diakses melalui <http://simnangkis.jogjaprov.go.id/public/>.

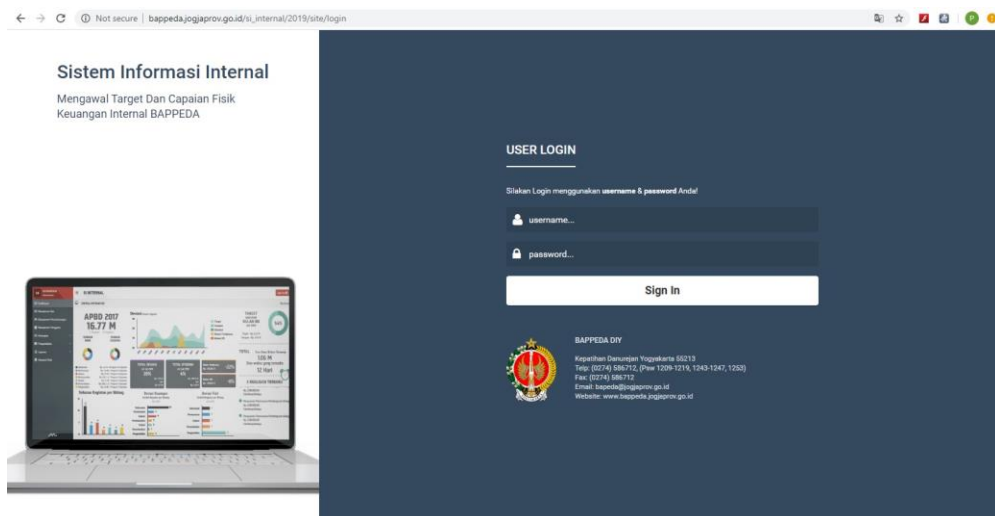
Gambar II.4 Aplikasi Sistem Penanggulangan Kemiskinan



2.5.5. Aplikasi Sistem Informasi Internal

Sistem Informasi Internal Bappeda DIY dibangun pada tahun 2016 dengan fungsi utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan internal di Bappeda DIY. Sistem Informasi Internal telah mampu mendorong efektivitas pelaksanaan monev kegiatan di Bappeda. Gambar aplikasi Sistem Informasi Internal Bappeda dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II.5 Sistem Informasi Internal Bappeda DIY



Sumber : http://www.bappeda.jogjaprov.go.id/si_internal/

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2019*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Realisasi Anggaran*
4. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Bappeda DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2019. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2018	TAHUN 2019				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4			5	6	7	8	
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indikator: Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah Meta Indikator: Indikator sasaran PD Tahun N yang tercapai/indikator sasaran RPJMD x 100%	%	83	91,35	84	95,95	114,2	Sangat Baik	85,5

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

Sasaran strategis Bappeda DIY yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas” diukur dengan menggunakan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah, dan meta indikator yaitu indikator sasaran perangkat daerah tahun N yang tercapai dibagi dengan indikator sasaran yang ada pada RPJMD dikali 100%. Penghitungan capaian sasaran Bappeda tahun 2019 yaitu 71 sasaran perangkat daerah yang tercapai dibagi dengan jumlah sasaran perangkat daerah keseluruhan sejumlah 74 dikali 100%, sehingga diperoleh realisasi sebesar 95,95%.

Kinerja sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	91,35	84	95,95	114,2	85,5	112,2

3.1.1.1 Data Dukung **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas**

Sebagai perangkat daerah dengan tugas utama perencanaan, Bappeda perlu menjamin ketercapaian sasaran seluruh perangkat daerah di DIY sebagai wujud dari ketepatan, efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan. Sasaran perangkat daerah di DIY dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4
Data Dukung Capaian Sasaran Bappeda
(Sasaran Perangkat Daerah DIY Tahun 2019)

No	Perangkat Daerah	Jumlah		Jumlah		Keterangan
		Sasaran	Indikator sasaran	Tercapai	Tidak tercapai	
1.	BPBD	1	1	1	0	
2.	Sekretariat DPRD	2	3	2	0	
3.	BKD	1	1	1	0	
4.	Bandiklat	1	1	1	0	
5.	Satpol PP	1	1	1	0	
6.	Inspektorat	1	1	1	0	
7.	Paniradya	3	3	3	0	
8.	Dinas Kominfo	1	1	0	1	
9.	Biro UHP	2	2	2	0	
10.	Biro Hukum	2	2	2	0	
11.	Biro Organisasi	2	2	2	0	
12.	Biro Tapem	2	2	2	0	
13.	Badan Kesbangpol	1	1	1	0	
14.	Badan Penghubung Daerah	1	1	1	0	
15.	BPKA	2	2	2	0	
16.	Disnakertrans	3	3	3	0	

No	Perangkat Daerah	Jumlah		Jumlah		Keterangan
		Sasaran	Indikator sasaran	Tercapai	Tidak tercapai	
17.	Dislautkan	2	2	2	0	
18.	DPKP	3	3	3	0	
19.	Disperindag	2	2	2	0	
20.	Diskop UKM	2	3	2	0	
21.	Dinas Pariwisata	2	2	2	0	
22.	DPPM	2	2	2	0	
23.	Biro Adm Perekonomian	1	1	1	0	
24.	Dinas Perhubungan	1	1	1	0	
25.	DLHK	2	2	2	0	
26.	DPUPESDM	8	8	8	0	
27.	Dinas PTR	4	4	4	0	
28.	Biro PIPWP2	1	1	1	0	
29.	Dinas Dikpora	3	7	2	1	1dari 5 indikator pada sasaran 1 tidak tercapai yaitu Rata-rata Hasil Ujian Nasional SMK
30.	Dinas Kesehatan	4	4	4	0	
31.	Dinas Sosial	2	2	2	0	
32.	Dinas Kebudayaan	1	4	1	0	
33.	DP3AP2	3	3	2	1	
34.	DPAD	2	2	2	0	
35.	Biro Bina Mental	1	1	1	0	

No	Perangkat Daerah	Jumlah		Jumlah		Keterangan
		Sasaran	Indikator sasaran	Tercapai	Tidak tercapai	
36.	Biro Pemberdayaan Masyarakat	2	3	2	0	
Jumlah		74	83	71	3	

Sasaran perangkat daerah yang tidak tercapai ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tingkat ketercapaian sasaran sebesar 71,43%, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan tingkat ketercapaian sebesar 95,58%, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dengan tingkat ketercapaian sasaran sebesar 93,62%. Untuk itu, perlu peningkatan kualitas perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Bidang Sosial Budaya Bappeda sebagai mitra kerja perangkat daerah tersebut.

3.2 Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

Sumber : Bappeda, 2019 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

- Tercapai sebesar 95,95%; dengan demikian prosentase capaian terhadap target 114,2%
- Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 5,03%
- Sesuai target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai
- Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran disebabkan oleh dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dalam perencanaan, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, ketepatan perencanaan dan penetapan sasaran pembangunan, serta ketersediaan data-data pendukung dalam melakukan perencanaan

3.3. Realisasi Anggaran

Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	84%	95,95%	114,2%	11.073.811.260,00	10.313.060.809,00	91,13
Jumlah						11.073.811.260,00	10.313.060.809,00	91,13
Program pendukung						4.049.519.710,00	3.290.040.387,00	81,24
Total Belanja Langsung						15.123.330.970,00	13.603.101.196,00	89,95

Berdasarkan tabel III.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.11.073.811.260,00, terealisasi Rp.10.313.060.809,00 atau 91,13%, dan program pendukung sebesar Rp.4.049.519.710,00, dengan realisasi sebesar Rp.3.290.040.387,00 atau 81,24%. Sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp.1.520.229.774,00 atau 10,05% antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi honorarium non PNS

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun sasaran strategis Bappeda tercapai 114,2%, dan terdapat efisiensi belanja sebesar Rp.1.520.229.774,00 (10,05%).

3.4 Inovasi

Pada tahun 2019, Bappeda mengembangkan fitur e-LKPJ pada Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah (Sengguh) DIY untuk memudahkan entri data dalam penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur. Selain itu, Bappeda juga mengembangkan aplikasi perencanaan Jogjaplan dengan menambahkan fitur Pokir Dewan untuk menampung pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan ke dalam RKPJ (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”, dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah, realisasi kinerja Bappeda tahun 2019 adalah sebesar 114,2%
2. Realisasi kinerja Bappeda telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 84%, dengan efisiensi anggaran sebesar 10,05%
3. Secara umum, kinerja Bappeda telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan seperti ketersediaan data pembangunan yang komprehensif dan kontribusi kegiatan penelitian terhadap pengambilan kebijakan perencanaan

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Terus berupaya mempertahankan kinerja yang telah baik
2. Melakukan koordinasi internal yang intensif agar peningkatan kinerja baik pada level eselon 3 dan eselon 4 bisa terus ditingkatkan

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	persen	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213 Telepon (0274) 589583, 562811

(Psw1209-1220, 1243-1247, 1219), ,

Faximili. (0274) 586712 Website www.bappeda.jogjapro.go.id

Email : bappeda@jogjapro.go.id Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI WIBOWO, S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X

Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, Januari 2019

PIHAK KEDUA

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH DIY



BUDI WIBOWO, S.H., M.M.

NIP. 19610127 198503 1 006

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : BAPPEDA DIY
Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	84,00	Triwulan I	0,00
					Triwulan II	0,00
					Triwulan III	0,00
					Triwulan IV	84,00

Jumlah Anggaran	:	Rp. 14.944.435.470,00	Keterangan
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	:	Rp 2.309.219.200,00	Anggaran APBD :
2. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	:	Rp 1.121.421.000,00	Rp 14.944.435.470,00
3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	:	Rp 1.357.159.000,00	Anggaran Dekonsentrasi :
4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Sarana Prasarana	:	Rp 856.030.000,00	Rp 920.491.000,00
5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	:	Rp 704.925.060,00	
6. Program Pengendalian Pembangunan Daerah	:	Rp 1.928.582.500,00	
7. Program Pengembangan Statistik Daerah	:	Rp 2.117.234.500,00	
8. Program Penelitian dan Pengembangan	:	Rp 500.000.000,00	
9. Program Administrasi Perkantoran	:	Rp 2.225.401.510,00	
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	:	Rp 1.179.629.000,00	
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	:	Rp 184.360.000,00	
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	:	Rp 460.473.700,00	

Yogyakarta, Januari 2019



Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Kompleks Youth Center, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati Kabupaten Sleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567

Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> Email :
inspektorat@jogjaprov.go.id

Nomor : 700/01333

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi
atas Implementasi Sistem AKIP
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah DIY

Yogyakarta, 06-05-2013

Kepada

Yth. Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

di _

Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 1. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;

2. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - a) Pemenuhan Pengukuran;
 - b) Kualitas Pengukuran;
 - c) Implementasi Pengukuran.
3. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - a) Pemenuhan Pelaporan;
 - b) Penyajian Informasi Kinerja;
 - c) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
4. Evaluasi Internal meliputi:
 - a) Pemenuhan Evaluasi;
 - b) Kualitas Evaluasi;
 - c) Pemanfaatan Evaluasi.
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY memperoleh nilai sebesar 90,06 kategori AA dengan interpretasi sangat memuaskan.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 28,71 atau 95,69% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,23 atau 92,92% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,69 atau 91,25% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 9,13 atau 91,25% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 15,31 atau 76,56% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2017 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut yaitu melakukan peningkatan kualitas perencanaan dengan menerapkan *cascading RPJMD* untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah dan melakukan pengendalian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan *Balance Score Card* (BSC).

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY beserta seluruh jajarannya agar:
- Melakukan upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja yang telah baik.
 - Melakukan *management resource meeting* membahas ketersediaan input dengan target kinerja yang akan dicapai dan supervisi atas pengumpulan data kinerja sebagai tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Daerah DIY yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY Tahun 2018, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



WYGS SANTOSO, SE, M.Acc
NIP. 196802151994031005

Tembusan :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦧꦫꦤ꧀ꦥꦼꦫꦺꦤꦿꦤ꧀ꦥꦧꦁꦸꦤ꧀ꦢꦤꦼꦫꦏꦿꦠ

Alamat Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 589583

Faxsimile (0274) 586712

Website : <http://www.bappeda.jogjaprov.go.id> e-mail : bappeda@jogjaprov.go.id

Kode Pos 55213

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKj IP TAHUN SEBELUMNYA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01333 tanggal 6 Mei 2019, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja yang telah baik2. Melakukan <i>management resource meeting</i> membahas ketersediaan input dengan target kinerja yang akan dicapai dan supervisi atas pengumpulan data kinerja sebagai tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Daerah DIY yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB	<ol style="list-style-type: none">1. Berupaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah baik2. Melakukan rapat koordinasi yang intensif antar bidang pengampu kinerja di Bappeda

Yogyakarta, 31 Desember 2019

Kepala Bappeda DIY

BUDI WIBOWO, SH, MM

NIP. 19610127 198503 1 006